



Kerangka Acuan Kegiatan

[KONSULTAN PENYUSUNAN MODUL DAN FASILITATOR AUDIT SOSIAL DAN MEKANISME PENANGANAN ADUAN]

Latar Belakang

Kemiskinan endemik di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Semarang menunjukkan bahwa faktor struktural atau “perangkap kemiskinan” sangat mengakar di masyarakat. Teori kemiskinan struktural menggeser fokus pada fenomena pengasingan social (*social exclusion*) atau kondisi yang cenderung menghasilkan dan melanggengkan kemiskinan kronis. Kebebasan politik dan jaminan transparansi sekarang secara luas diakui sebagai komponen integral dari strategi pengurangan kemiskinan yang efektif, dan reformasi pemerintahan telah menjadi strategi pengurangan kemiskinan yang tidak terpisahkan.

Program pengentasan kemiskinan dan anti-korupsi, harus mempromosikan perubahan sosial dan memasukkan strategi mempercepat langkah pemberantasan korupsi dan program sosial yang bertujuan menghilangkan hambatan struktural ke dalam agenda politik, dan untuk menghasilkan kemauan politik (*political will*); dengan kata lain, mengejar reformasi demokrasi dan memperkuat permintaan publik untuk akuntabilitas politik. Ini akan tercapai melalui penguatan kualitas representasi politik dan pengintegrasian partisipasi publik dalam proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

Strengthening Public services through the Empowerment of women-led Advocacy and social audit networks (SPEAK) adalah sebuah proyek empat tahun (Maret 2018 - Februari 2022) yang bertujuan untuk melembagakan partisipasi masyarakat yang konstruktif dan efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah untuk mengatasi kemiskinan struktural. Proyek ini didanai bersama oleh Uni Eropa dan Hivos Open-Up Contracting. Hivos,



Perkumpulan IDEA, dan mitra lokal berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas kelompok perempuan lokal untuk mengadvokasi anggaran yang responsif gender dan inklusif, dan untuk memfasilitasi audit sosial guna meningkatkan akuntabilitas pengadaan publik dan layanan publik melalui pemantauan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk memperkuat 2 OMS lokal dan 5 kelompok perempuan untuk mengembangkan jaringan lebih dari 240 perempuan, memberdayakan 550.000 laki-laki dan perempuan yang terpinggirkan secara ekonomi di Kota Semarang dan Kabupaten Bojonegoro.

Salah satu upaya penguatan partisipasi kelompok perempuan dalam perencanaan penganggaran daerah adalah dengan melakukan monitoring berbasis komunitas. Untuk itu, Perkumpulan IDEA akan menyusun dua modul pelatihan yang terdiri dari 1) Modul Audit Sosial dan 2) Modul Mekanisme Penanganan Aduan Warga. Kedua modul tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan kelompok perempuan dalam melakukan monitoring program pemerintah di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Semarang, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Dalam rangka menyusun kedua modul di atas, Perkumpulan IDEA Yogyakarta akan membuka pengadaan jasa konsultan. Konsultan yang menyusun modul juga bertugas mengimplementasikan modul yang telah disusun. Adapun implementasi modul yang dimaksud adalah menjadi fasilitator *Training of Trainer (ToT)* Modul Audit Sosial, sehingga *community leader* yang terlibat dalam ToT melaksanakan audit sosial secara mandiri bersama komunitas masing-masing.



Tujuan

- 1) Konsultan menyusun modul pelatihan yang akan digunakan oleh kelompok perempuan untuk melakukan monitoring perencanaan pembangunan dengan metode audit sosial dan mekanisme penanganan aduan untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Semarang.
- 2) Konsultan melakukan Training of Trainer (ToT) kepada kelompok perempuan dan tim pelaksana lapangan untuk mengimplementasikan audit sosial dan mekanisme penanganan aduan untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Semarang.
- 3) Konsultan melakukan fasilitasi workshop audit sosial di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Semarang untuk menentukan program dan/atau kegiatan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang akan dimonitoring menggunakan metode audit sosial.
- 4) Konsultan melakukan fasilitasi Training Audit Sosial dan Mekanisme Penanganan Aduan untuk kelompok perempuan di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Semarang.

Hasil

- 1) Tersusunnya satu modul pelatihan audit sosial dan satu modul pelatihan mekanisme penanganan aduan untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Semarang.
- 2) Tersedianya sepuluh trainer dari pelaksanaan Training of Trainer (ToT) Audit Sosial dan mekanisme penanganan aduan untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang akan melatih dan/atau mendampingi kelompok perempuan di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Semarang.

- 3) Adanya daftar program dan/atau kegiatan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Semarang yang akan dimonitoring menggunakan metode audit sosial.
- 4) Adanya kelompok-kelompok perempuan yang terlatih menggunakan metode audit sosial untuk memonitoring program dan/atau kegiatan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Semarang.

Tahapan Kegiatan

Kode Kegiatan	Tahapan	Waktu
2.1.1	Penyusunan Modul Audit Sosial dan Mekanisme Penanganan Aduan (Mekanisme Penanganan Aduan)	September 2020
2.1.2	Fasilitator ToT Audit Sosial dan Mekanisme Penanganan Aduan (Mekanisme Penanganan Aduan)	Oktober 2020
2.1.3	Fasilitator workshop penentuan isu yang akan diaudit	Oktober - Desember 2020
2.1.4	Fasilitator Training Audit Sosial dan Mekanisme Penanganan Aduan untuk kelompok perempuan	November 2020



Kriteria

Kriteria konsultan penyusunan modul dan fasilitator dan audit sosial dan mekanisme penanganan aduan warga adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan minimal S1 (ilmu sosial)
- 2) Berpengalaman langsung dalam menyusun modul dan fasilitasi pelatihan audit sosial, monitoring berbasis masyarakat, dan harap menyertakan link/copy dari modul yang pernah dikembangkan.
- 3) Perseorangan atau tim yang memiliki pengalaman terkait kebijakan di sektor pendidikan dan kesehatan baik di tingkat Kabupaten/Kota terutama di lokasi program (Kota Semarang dan Kabupaten Bojonegoro) merupakan kelebihan dalam proses seleksi ini.
- 4) Mengirimkan proposal yang berisi:
 - a) Strategi/pendekatan/rencana kerja yang akan dilakukan untuk memenuhi output
 - b) Langkah-langkah pengerjaan penyelesaian output
 - c) Timeline tahapan dan penyelesaian pekerjaan
 - d) CV calon konsultan (CV tim calon konsultan bila bekerja dalam tim)

Anggaran

Pelaksanaan kegiatan konsultasi ini menggunakan anggaran Program SPEAK dengan kode sebagai berikut:

2.1.1. Penyusunan Modul Audit Sosial dan Mekanisme Penanganan Aduan (Mekanisme Penanganan Aduan)

2.1.2. Fasilitator ToT Audit Sosial dan Mekanisme Penanganan Aduan (Mekanisme Penanganan Aduan)

2.1.3. Fasilitator workshop penentuan isu yang akan diaudit

2.1.4. Fasilitator Training Audit Sosial dan Mekanisme Penanganan Aduan untuk kelompok perempuan

Kegiatan	Anggaran	Kode Anggaran
2.1.1. Penyusunan Modul Audit Sosial dan Mekanisme Penanganan Aduan		
Fasilitator untuk koordinasi penyusunan modul	Rp, 4.950.000	2.1.1.
Fasilitator untuk ToT modul sosial audit dan Mekanisme Penanganan Aduan (tim program)	Rp, 9.900.000	2.1.1.
Konsultan untuk menyusun modul audit sosial dan modul Mekanisme Penanganan Aduan	Rp, 9.900.000	2.1.1.
2.1.2. Fasilitator ToT Audit Sosial dan Mekanisme Penanganan Aduan		
Konsultan untuk FGD persiapan ToT modul audit sosial di dua daerah	Rp, 4.950.000	2.1.2.
Fasilitator untuk ToT modul audit sosial dan Mekanisme Penanganan Aduan kepada community leader di dua daerah	Rp, 9.900.000	2.1.2.
Honorarium untuk ToT social audit di dua daerah	Rp, 6.499.020	2.1.2.
2.1.3. Fasilitator workshop penentuan isu yang akan diaudit		
Fasilitator untuk workshop penentuan monitoring program di dua daerah, total 6 kali workshop	Rp, 24.750.000	2.1.3.
Honorarium workshop penentuan monitoring program di dua daerah, total 6 kali workshop	Rp, 9.748.530	2.1.3.
2.1.4. Fasilitator Training Audit Sosial dan Mekanisme Penanganan Aduan untuk kelompok perempuan		



Konsultan untuk tindak lanjut audit sosial 5 kali di masing-masing daerah	Rp, 24.750.000	2.1.4.
Honorarium untuk fasilitator training audit sosial 5 kali masing-masing daerah	Rp, 32.495.100	2.1.4.
Total Anggaran	Rp, 137.842.650	